

bulletin bpkSDM

Badan Pembinaan Konstruksi dan Sumber Daya Manusia
Departemen Pekerjaan Umum



BOOMING KONSTRUKSI INDONESIA

3 Cinta Konstruksi Dalam
Negeri

10 Tahun 2008 Banjir Proyek

Daftar Isi

<i>Ragam</i>	
Cita Konstruksi Dalam Negeri	3
<i>Lensa</i>	
Booming Konstruksi Indonesia	5
<i>Lensa</i>	
Pentingnya Aturan-aturan Terbaru Terkait Jasa Konstruksi Nasional	7
Galeri Foto	9
<i>Opini</i>	
Tahun 2008 Banjir Proyek	10
<i>Opini</i>	
Paket Kegiatan Pekerjaan Konstruksi Di Lapangan	11
<i>Lensa</i>	
BPKSDM Turut Hijaukan Dunia	13
<i>Opini</i>	
Hari Bhakti PU dan Relevansinya Dengan Pembinaan Jasa Konstruksi	15

Surat Pembaca

Redaksi yth,

Dapatkah kami mendapatkan info beasiswa terkait dengan pelatihan konstruksi di Indonesia? terima kasih sebelumnya.

Ade/Mahasiswa
Batam

Redaksi bulletin BPKSDM,

Bagaimanakah cara untuk mengikuti tender tahun 2008? Saya mendengar bahwa tender telah dimulai sejak Nopember 2007. Sekedar masukan, akan sangat membantu bila Bulletin juga memuat daftar tentang tender apa saja yang dibutuhkan di Departemen PU.

Bowo/Pengusaha
Medan

Dari Redaksi



Bulan Desember di akhir tahun selalu dijadikan ajang untuk merenung, *review* apa yang telah dilakukan sepanjang tahun agar diambil manfaat dalam perencanaan ke depannya.

Dalam bulan yang sama, rangkaian kegiatan Konstruksi Indonesia 2007 berakhir dan diulas dalam Lensa beserta Galeri Foto yang mengintip kinerja dari BPKSDM. Beberapa pendapat yang menarik dalam Opini, diantaranya tahun 2008 banjir proyek, paket pekerjaan konstruksi di lapangan serta Hari Bhakti PU dan relevansinya dengan Pembinaan Jasa Konstruksi. Sekilas ulasan tentang produk anak bangsa dalam Ragam. Selamat membaca dan selamat tahun baru..!

Kutipan Bijak

- “Seorang pemimpin sejati selalu menyimpan sebuah elemen kejutan ditangannya, yang orang lain tak bisa menduga tetapi mampu membuat masyarakat kagum dan heran.” (**Charles De Gaulle**)
- “Tindakan hari ini menentukan nasib kita hari esok.” (**Swami Chinmayananda**)

Pembina/Pelindung : Kepala Badan Pembinaan Konstruksi dan Sumber Daya Manusia;

Penanggung Jawab : Sekretaris Badan Pembinaan Konstruksi dan Sumber Daya Manusia; **Wakil Penanggung Jawab** : Kepala Pusat Pembinaan Usaha Konstruksi, Kepala Pusat Pembinaan Penyelenggaraan Konstruksi, Kepala Pusat Pembinaan Keahlian dan Teknik Konstruksi, Kepala Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi; **Pemimpin Redaksi** : Surtiningsih;

Redaksi Pelaksana : Nanan Abidin; **Anggota Redaksi** : Doedoeng Z. Arifin, Bambang Soekaryatno, Eddy Sunyoto, Sari Mustika, Yaya Supriyatna, Ero, Cakra Nagara, Agnes S.P. Trisnowati, Titik Murti Utami, Subagio, Yanto Apriyanto, Sri Yuliawati, Madya Gunawan, Agus Firngadi, Sugeng Sunyoto, Krisnawati Pratiwi Hadi, Meylina Hasbullah;

Administrasi dan Distribusi : Agus Kurniawan, **Desain/Tata letak** : Nanang Supriyadi **Photografer** : Sri Bagus Herutomo

CINTA KONSTRUKSI DALAM NEGERI

Menghargai karya bangsa sendiri, seperti menjadi suatu hal yang jarang didapati akhir-akhir ini. Hingga seperti tersentak kesadaran kita saat beberapa waktu yang lalu, saat beberapa karya anak bangsa 'diakui' oleh bangsa lain. Seakan baru tersadarkan bahwa kita memiliki karya yang demikian mengagumkan hingga menarik minat orang lain, yang sayang sekali justru jarang dilirik apalagi digunakan oleh masyarakat Indonesia sendiri.

Konstruksi Indonesia Tempoe Doeloe

Tak terkecuali di bidang konstruksi, bangsa Indonesia ternyata telah memiliki hasil karya asli buatan sendiri. Hebatnya, karya tersebut tidak hanya indah namun juga telah memenuhi teknologi konstruksi yang ramah lingkungan, tahan gempa, dan terlebih lagi serta paling penting adalah sesuai dengan kondisi lingkungan Indonesia yang spesifik berbeda dengan wilayah lain di dunia.

Sebut saja bangunan Candi yang tersebar di beberapa wilayah Indonesia, terutama di Pulau Jawa, terbukti secara empirik menggunakan lapisan pasir yang dimaksudkan untuk menghadapi resiko gempa. Kemudian penggunaan sambungan dan dimensi arsitektural atas kearifan lokal pada bangunan rumah Gadang di Sumatera Barat dan rumah Joglo yang terdapat di Pulau Jawa, juga membuktikan bahwa bangsa ini sesungguhnya memiliki budaya teknologi bangunan tahan gempa, jauh sebelum teknologi digital dari Barat datang ke negeri ini.

Permasalahan yang kemudian muncul adalah bagaimana mengimplementasikan teknologi yang telah lama 'terpendam' tersebut? Sebab tak mungkin akan diimplementasikan jika masyarakat mengetahuinya pun tidak. Perlu sebuah media khusus yang akan menjembatani pengetahuan yang telah terasing kembali kepada pangkuan ibu pertiwi sebelum mungkin diakui oleh bangsa lain hanya karena dibiarkan begitu saja oleh "pemiliknya".

Itulah yang menjadi alasan Departemen Pekerjaan Umum kemudian melalui moment Konstruksi Indonesia 2007, menerbitkan Buku Konstruksi Indonesia 2007 dengan tema " Karya Anak Bangsa Teknologi Rumah Tahan Gempa". Pemilihan tema tersebut bukanlah tanpa alasan, menurut Akhmad Suraji, salah seorang editor, konsep tersebut diangkat dengan maksud. Pertama, beberapa wilayah di Indonesia baru saja mengalami bencana gempa bumi, diharapkan pengetahuan dalam Buku KI 2007 akan relevan dengan kebutuhan masyarakat luas.

Kedua, pengembangan budaya lokal, melalui penyebaran warisan nenek moyang yang sesuai kondisi lingkungan setempat serta menggunakan bahan lokal yang tentunya efisien secara biaya. Ketiga, mendorong teknologi lokal yang berimbas kepada kebanggaan akan produksi dalam negeri, mengingat hingga saat ini belum ada instrumen untuk mendorong karya anak bangsa.

Melalui Buku Konstruksi Indonesia 2007 diharapkan anak bangsa di abad ini dapat menyadari bahwa sesungguhnya nenek moyang kita telah dengan arif menggunakan teknologi lokal dalam membangun rumah tahan gempa. Melalui kesadaran yang terbangun pada gilirannya mampu menggugah dan mendorong berbagai pihak pemangku kepentingan terus melakukan pengembangan teknologi konstruksi yang memiliki konteks ke-Indonesia-an.

Konstruksi Indonesia Masa Kini

Penemuan teknologi tahan gempa yang ternyata telah dimiliki oleh nenek moyang bangsa ini di masa lampau, diam-diam telah juga ditemukan oleh anak bangsa di masa kini. Gempa bumi dahsyat berkekuatan 8,9 SR yang mengguncang Nanggroe Aceh Darussalam diikuti gelombang tsunami pada akhir tahun 2004 lalu, menyisakan duka yang mendalam bagi bangsa ini. Tak



terhitung korban jiwa melayang, kerusakan infrastruktur, harta benda, dan lain sebagainya akibat datangnya bencana ini.

Namun di antara bangunan-bangunan yang rusak rata dengan tanah, baik karena kuatnya guncangan maupun karena sapuan gelombang tsunami, masih ada beberapa bangunan disana yang kokoh berdiri. Salah satunya Bangunan Dinas Kesehatan di Pulau Simeulue, yang notabene merupakan pusat gempa. Usut punya usut, bangunan-bangunan tersebut menggunakan pondasi Ramah Gempa Konstruksi Sarang Laba-laba (KSLL).

Apakah Konstruksi Sarang Laba-Laba dan darimanakah dia diciptakan? KSLL merupakan penemuan baru dalam bidang konstruksi bangunan modern terutama dalam pondasi, hasil penemuan dua orang anak bangsa Ryantori dan Sutjipto, keduanya kuliah di Fakultas Teknik Sipil ITS pada tahun 1970-an. Terciptanya KSLL bermula dari persoalan yang harus mereka temukan solusinya, yaitu mencari penyebab kegagalan pada lantai dasar dari beberapa proyek.

Dari hasil penelitian yang mereka lakukan kemudian ditemukan solusi yang melahirkan sebuah sistem konstruksi pondasi baru yang dinamakan Konstruksi Sarang Laba-Laba (KSLL). Konstruksi tersebut dinamakan sarang laba-laba karena pembesian pelat pondasi di daerah kolom memang seperti jaring laba-laba dan berfungsi untuk menyebarkan bebas melalui plat ke rib-rib (rusuk) yang lain. KSLL bisa digambarkan sebagai rancangan kombinasi rib dengan tanah.

Kelebihan sistem ini antara lain, ekonomis sebab mampu menghemat biaya hingga sekitar 30 % dibanding pondasi konvensional sebab 90 % komponennya adalah tanah. Bahkan untuk pondasi dalam, penghematan tersebut bisa mencapai 50 %. Pengerjaan KSLL juga efisien waktu karena dapat dilaksanakan dengan menerapkan prinsip 'ban berjalan', selain juga dilaksanakan secara padat karya yang berarti mampu menyerap tenaga kerja.

Namun yang paling penting diantara semua kelebihan tersebut, KSLL adalah konstruksi pondasi yang ramah gempa dan bahkan telah teruji dalam kondisi sesungguhnya. Bangunan-bangunan yang menggunakan KSLL pasca bencana tetap berdiri kokoh dan dapat dipergunakan dengan baik. Hampir 100 (seratus)



bangunan teruji terhadap bencana gempa bumi hingga 9 pada Skala Richter (SR) dan tsunami di Nanggroe Aceh Darussalam, Papua, Sumatera Barat, Bengkulu dan sekitarnya. Ribuan orang penghuninya terselamatkan nyawanya sekaligus menyelamatkan asset negara bernilai ratusan milyar rupiah. KSLL merupakan prestasi dunia dari Indonesia.

Sekali lagi bangsa ini mampu menunjukkan mampu berdiri di atas kaki sendiri melalui inovasi-inovasi di bidang Konstruksi, baik dari masa lampau hingga hari ini. Sekarang yang menjadi pekerjaan rumah bersama adalah bagaimana melestarikan bahkan terus mengembangkan teknologi-teknologi yang telah ada tersebut diketahui dan dipakai bangsa sendiri jika perlu di seluruh dunia. Sudah saatnya anak bangsa kembali kepada selera asal, mempersembahkan inspirasi dan inovasi untuk bangsa. Jika bukan kita yang mencintai produk sendiri, lalu siapa lagi? (tw)



Melalui Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 338/KPTS/M/2007 tentang penyelenggaraan Konstruksi Indonesia 2007 yang bertema “Meningkatkan Kompetensi Konstruksi Indonesia untuk Mewujudkan Daya Saing Bangsa”. Taelah ditetapkan kegiatan yang mencakup Lomba Tukang dan Mandor, Lomba Foto Konstruksi, Lomba Jurnalistik / Karya Tulis Media Cetak, Lomba Karya Ilmiah terkait Konstruksi, Lomba Karya Konstruksi, Lomba Kinerja Badan Usaha Konstruksi, Penyusunan Buku Konstruksi 2007, serta Seminar dan Pameran.

Berbagai kegiatan tersebut telah diadakan di berbagai tempat di Jakarta, peserta telah diseleksi dan diumumkan pemenangnya. Setelah itu apa? Para pemenang akan dipublikasikan baik karya maupun individunya. Diharapkan inovasi karya-karya lain akan terus bermunculan dan menciptakan variasi keunggulan dari peserta lomba kedepannya.

Berbagai kalangan di Indonesia yang bersentuhan dengan Konstruksi Indonesia telah terlibat dan berperan dalam pelaksanaan KI 2007. Pemerintah, Swasta, Akademisi, dan Media bersama-sama telah menyumbangkan karya dan idenya bagi Konstruksi Indonesia dan Pembangunan Infrastruktur yang bersentuhan dengan rakyat banyak. Tahun depan, Konstruksi Indonesia akan diselenggarakan dengan lebih meriah, dan mungkin dengan lebih variasi. Contoh pertambahan lomba di tahun 2007 adalah lomba tukang taman, tahun depan direncanakan lomba tukang dan mandor akan menampilkan inovasi-inovasi baru yang menarik, seperti lomba operator excavator, taman gantung, lomba mekanik dan lain sebagainya.

Tahun 2008

Tiga prioritas utama dari kebijakan pemerintah mengenai Pembangunan Infrastruktur 2008, yaitu Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas, Peningkatan Penciptaan lapangan Kerja serta Pengentasan Kemiskinan. Dari kebijakan tersebut, ditetapkan Pagu Sementara Dep. Pekerjaan Umum sesuai SE Menteri Keuangan No. 529/MK.02/2007 & No. 0284/M.PPN/07/2007

tanggal 30 Juli 2007 sebesar Rp. 35,646 triliun, maka dapat diprediksi bahwa masih banyak prasarana dan sarana bidang pekerjaan umum yang belum tertangani secara optimal yang akan membebani RAPBN tahun berikutnya dan menghambat pencapaian sasaran pembangunan nasional sehingga diperlukan upaya/langkah-langkah lebih bijaksana dalam penentuan prioritas program dan kegiatan pembangunan TA 2008.

Pagu sementara tahun 2008 Dep. Pekerjaan Umum adalah sebesar Rp. 35,646 trilyun, yang terdiri dari Rupiah Murni sebesar Rp. 29,07 trilyun, PLN sebesar Rp. 6,56 trilyun dan terbagi dalam Bidang Bina Marga sebesar Rp. 18,527 trilyun, Bidang Sumber Daya Air sebesar Rp. 9,399 trilyun, Bidang Cipta Karya sebesar Rp. 6,125 trilyun, Bidang Penataan Ruang sebesar Rp. 0,267 trilyun dan Bidang Administrasi Pembangunan dan Pemerintahan sebesar Rp. 1,325 trilyun.

Terlepas dari itu, bagaimana dengan kesiapan dari pelaku Jasa Konstruksi? Di luar faktor teknis konstruksi, perlu pertimbangan sebagai berikut : stabilitas sosial dan politik nasional, stabilitas pasar baik global, regional, nasional dan lokal, misalnya nilai rupiah terhadap dollar, semakin meningkatnya harga minyak, kelangkaan aspal dan lain-lain.



Disadari perlunya kesiapan untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur 2008 dalam bentuk dukungan aspek legal, seperti peningkatan besarnya *billing rate* konsultan, keringanan pajak aspal untuk mengantisipasi kenaikan harga minyak dunia terhadap harga aspal, pembenahan terhadap sertifikasi SDM kontraktor maupun konsultan. Dukungan terhadap kesiapan material (batu, kerikil, pasir, semen, beton, aspal) meliputi pemantauan kebutuhan material hingga tahun 2008 cukup, namun perlu perhatian terhadap kesiapan *delivery* material dari *quarry* hingga ke lokasi proyek, perlu perhatian khusus untuk aspal, karena prediksi 2008 akan terjadi defisit.

Selain itu dukungan bagi kesiapan peralatan dari sisi kualitas / kapasitas dan kuantitas produksi maupun SDM mulai dari sistem

pembinaan hingga sertifikasi profesional. Inovasi mutlak diperlukan dari teknologi, legal dan finansial – termasuk database yang terkait dengan pembangunan infrastruktur.

Dukungan lainnya yang tak kalah penting adalah aspek lingkungan. Saat ini, lingkungan adalah isu yang turut menjadi perhatian dunia dan perlu diwaspadai seperti *global warming* dan *illegal logging*. Pembangunan Infrastruktur 2008pun terkait dengan hal-hal tersebut. Konstruksi Indonesia yang telah menjadi agenda tahunan, di tahun 2008 dihadirkan rangkaian kegiatan yang mengulas karya-karya dan inovasi dari anak bangsa untuk Indonesia. (Mh)

Pemenang Konstruksi Indonesia 2007

Lomba Jurnalistik / Karya Tulis Media Cetak

1. Kategori Artikel/Laporan :
 - Suara Pembaruan (Juara I),
 - Kompas (Juara II),
 - Sinar Harapan (Juara III)
2. Kategori Tajuk Rencana :
 - Bisnis Indonesia (Juara I),
 - Republika (Juara II),
 - Pos Kota (Juara III)
3. Kategori Foto Berita :
 - Seputar Indonesia (Juara I),
 - Investor Daily (Juara II),
 - Bisnis Indonesia (Juara III)
4. Kategori Berita Terbanyak :
 - Investor Daily (Juara I),
 - Koran Tempo (Juara II),
 - Bisnis Indonesia (Juara III)

Lomba Foto

1. Kategori Hitam Putih :
 - Hari Setianto (Juara I),
 - Usman Iskandar (Juara II),
 - Sandhi Irawan (Juara III)
2. Kategori Bebas :
 - Gunawan Wicaksono (Juara I),
 - Riza Fathoni (Juara II),
 - Boy T. Harjanto (Juara III)
3. Favorit : Immanuel Sebayang

Lomba Tukang dan Mandor

1. Tukang Taman :
 - Ronni Suherdi, Susanto, Suwanda (Juara I);
 - Bisri Harahap, Ade, Muhammad Sidik (Juara II);
 - Kenting, Tahar, Sakun (Juara III)
2. Mandor Kayu :
 - Yaya Wahyudi, Imam Tukil, Endang (Juara I);
 - Jenudin, Sumatali, Sardika (Juara II)
 - Nur Afandi, Yuyo Wahyudin, Sugeng (Juara III)
3. Tukang Batu :
 - Suyanto (Juara I),
 - Suradi (Juara II),
 - Nurdin (Juara III)

4. Tukang Plumbing :
 - Enda (Juara I),
 - Katiman (Juara II),
 - Rusdi (Juara III)
5. Tukang Besi :
 - Emon H. (Juara I),
 - Juwito (Juara II),
 - Paryoto (Juara III)
6. Tukang Kayu :
 - Puziansyah (Juara I),
 - Parmin (Juara II),
 - Dato (Juara III)

Lomba Karya Tulis Ilmiah Terkait Konstruksi

1. Internal PU/Umum :
 - Dewi Larasati ZR (Juara I),
 - Doedoeng Z. Arifin (Juara II),
 - Sofia W. Alisjahbana (Juara III)
2. Mahasiswa / Pelajar :
 - Reni Karno Kinarsih (Juara I),
 - Maemar Chadavid Syamtar (Juara II),
 - Dian Rifany Kurniaty (Juara III)

Lomba Karya Konstruksi

- Kategori Teknik Konstruksi : PT Wijaya Karya
- Kategori Teknologi Konstruksi : PT. Katama Suryabumi
- Kategori Teknik Arsitektur : PT Tetra Disain Indonesia .
- Kategori Teknologi Tepat Guna : Ratna Hidayat.

Lomba Kinerja Badan Usaha Jasa Konstruksi Tingkat Provinsi

- Kualifikasi non Kecil : PT Suradi Sejahtera Raya (DI Yogyakarta)
- Kualifikasi non Kecil : PT Trampil Bina Sentosa (Lampung)
- Kualifikasi non Kecil : PT Tunas Jaya Sanur (Bali)
- Kualifikasi Kecil : CV Sadana Karya.



PENTINGNYA

Aturan-aturan Terbaru

Terkait Jasa Konstruksi Nasional

Infrastruktur tidak diragukan lagi menjadi salah satu sektor yang penting dalam Pembangunan Nasional. Untuk itu Pemerintah dalam hal ini Departemen Pekerjaan Umum telah menetapkan acuan dan aturan-aturan yang terkait dalam upaya pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur oleh Jasa Konstruksi Nasional, antara lain sebagai berikut :

I. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum No.20/SE/M/2007 Tanggal 07 November 2007 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa APBN Dep. PU T.A. 2008

Sebagaimana diketahui dalam TA. 2008 Departemen Pekerjaan Umum mendapat tugas pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur dengan anggaran yang cukup besar. Agar dana tersebut dapat dilaksanakan sesuai rencana, proses pemilihan penyedia barang/jasa harus dimulai sedini mungkin. Untuk itu berikut ini kami sampaikan beberapa petunjuk untuk dapat dilaksanakan :

Pertama, Proses Pemilihan penyedia barang/jasa agar segera dimulai pada bulan November 2007 setelah diperoleh kepastian dana dan lingkup pekerjaan dengan memperhatikan : (1) Satuan 3 yang termuat dalam lampiran Undang-Undang APBN 2008 setelah ditetapkan (2) Desain dan spesifikasi teknik serta dokumen-dokumen pemilihan penyedia barang/jasa benar-benar telah siap untuk pelaksanaan pelelangan (3) Pengadaan tanah yang diperlukan untuk pelaksanaan konstruksi telah diselesaikan dan tidak bermasalah (4) Pelaksanaan lelang berpedoman pada Keppres Nomor 80 Tahun 2003 beserta peraturan perubahannya dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

Kedua, Sebelum surat keputusan pengangkatan kepala satuan kerja TA. 2008 diterbitkan, panitia pengadaan untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Satuan Kerja/Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu/ Satuan Kerja Perangkat Daerah TA. 2007, dan harus dikukuhkan kembali oleh Kepala Satuan Kerja/Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu/Satuan Kerja Perangkat Daerah TA. 2008.

Ketiga, Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dilakukan setelah dokumen Anggaran/DIPA TA. 2008 disahkan. **Keempat**, Apabila Pejabat Pembuat Komitmen untuk TA. 2008 belum ditetapkan, maka hasil lelang disahkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen yang diangkat pada TA. 2007. **Kelima**, Apabila terdapat sanggahan dan Pejabat Pembuat Komitmen untuk TA. 2008 belum ditetapkan, maka Pejabat Pembuat Komitmen yang diangkat pada TA. 2007 wajib memberikan jawaban atas sanggahan.

Keenam, Apabila Pejabat Pembuat Komitmen yang ditetapkan untuk TA. 2008 berbeda dengan sebelumnya, maka Pejabat Pembuat Komitmen yang baru tersebut berkewajiban menandatangani Pakta Integritas dalam melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa. **Ketujuh**, Penandatanganan kontrak pengadaan barang/jasa. **Ketujuh**, Penandatanganan kontrak pengadaan barang/jasa dilakukan antara penyedia barang/jasa yang telah ditunjuk pada butir 3 di atas dengan pejabat berwenang yang menandatangani kontrak setelah dokumen anggaran/DIPA TA. 2008 untuk kegiatan dimaksud disahkan.

Kedelapan, Dalam menyusun dokumen pemilihan penyedia barang/jasa agar dicantumkan ketentuan antara lain : (1) Apabila dalam dokumen anggaran yang telah disahkan (DIPA TA. 2008) dananya

tidak tersedia atau tidak cukup tersedia yang akan mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan tersebut, maka pemilihan penyedia barang/jasa yang telah dilaksanakan batal demi hukum dan penyedia barang/jasa tidak dapat menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun (2) Penandatanganan kontrak akan dilakukan setelah dokumen anggaran/DIPA TA. 2008 untuk kegiatan tersebut disahkan.

Surat Edaran ini agar disampaikan kepada para Pejabat Pembuat Komitmen, Kepala Satuan Kerja/Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu/Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Atasan Langsung Kepala Satuan Kerja/Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu/ Satuan Kerja Perangkat Daerah, di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum untuk dilaksanakan.

II. Surat Menteri Pekerjaan Umum Nomor: IK.01.06- Mn/676 Tanggal 27 Desember 2007 Kepada Para Gubernur Kepala Daerah Provinsi di Seluruh Indonesia Tentang Pemberlakuan Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi dalam Proses Pengadaan Tahun Anggaran 2008

Menindaklanjuti Surat Menteri Pekerjaan Umum No. IK.01.06 – Mn/593 Tanggal 07 November 2007 Tentang Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi, dan memperhatikan Surat Dewan Pengurus LPJK-N No.290/LPJK/D/XII/2007 tanggal 13 Desember 2007, serta mempertimbangkan peningkatan pelaksanaan infrastruktur di tahun-tahun mendatang, bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

Pertama, Masa Berlaku Sertifikat Badan Usaha (SBU) jasa konstruksi tahun 2007 yang berakhir pada 31 Desember 2007 diperpanjang secara otomatis sampai dengan tanggal 31 Maret 2007 diperpanjang secara otomatis sampai dengan tanggal 31 Maret 2008. **Kedua**, Untuk pelaksanaan pengadaan jasa konstruksi mulai tanggal 1 April 2008 sepenuhnya menggunakan SBU 2008. SBU tersebut akan berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan. **Ketiga**, Berkaitan dengan butir 2 tersebut di atas, maka para penyedia jasa diwajibkan melakukan registrasi SBU 2008 mulai

tanggal 15 Januari 2008 di Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK).

III. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 22/SE/M/2007 Tanggal 12 Desember 2007 Tentang Pedoman Besaran Biaya Personil dalam Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) / Rencana Anggaran Biaya (RAB) Paket Pekerjaan Konsultasi di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum.

Peran usaha Jasa Konsultansi Nasional dipandang cukup strategis dalam upaya meningkatkan dan mempercepat pelaksanaan program pembangunan infrastruktur. Dalam rangka pembinaan untuk mendorong terwujudnya peningkatan profesionalisme Tenaga Ahli dan usaha jasa konsultansi yang berdaya saing dan memberikan apresiasi yang memadai maka dipandang perlu menetapkan pedoman Besaran Biaya Personil dalam penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)/Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk pekerjaan jasa konsultansi.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.05/2007 mengenai standar biaya sebagai acuan dalam penyusunan RAB, tidak mengatur standar biaya personil dan biaya non personil untuk pekerjaan Jasa Konsultansi karena kebutuhan kualifikasi (pendidikan, pengalaman dan jenis penugasan) tenaga ahli serta komponen biaya langsung yang diperlukan sangat beragam. Sehubungan dengan hal tersebut diatas guna keperluan penyusunan HPS/RAB pekerjaan jasa konsultansi, kami sampaikan sebagai berikut :

Pertama, Dalam penyusunan besaran Harga Perkiraan Sendiri (HPS)/ Rencana Anggaran Biaya (RAB) harus dibuat pada saat akan melakukan pengadaannya yang terdiri dari 2 (dua) komponen pokok yaitu biaya personil (*remuneration*) dan biaya non personil (*direct reimbursable cost*). **Kedua**, Dalam menyusun besaran biaya personil dapat ditentukan berdasarkan besaran biaya langsung personil seperti daftar terlampir.

Ketiga, Besaran biaya langsung personil tersebut, diperoleh dari kontrak-kontrak yang pernah dilaksanakan di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum lokasi di Jakarta dengan tanpa membedakan sumber dana, yang dinilai dapat digunakan sebagai acuan dalam penyusunan HPS/ RAB pekerjaan jasa konsultansi yang dibiayai dengan dana APBN dan sebagian atau seluruhnya dengan pinjaman/hibah luar negeri. Untuk keperluan penyusunan HPS/RAB pekerjaan jasa konsultansi di daerah-daerah lain, agar dilakukan penyesuaian dengan mempertimbangkan tempat (lokasi), keterbatasan fasilitas/ sarana prasarana/biaya setempat, yang wajar.

Surat Edaran ini agar disampaikan kepada para Pejabat Pembuat Komitmen, Kepala Satuan Kerja/ Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu/ Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Atasan Langsung Kepala Satuan Kerja/ Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu/ Satuan Kerja Perangkat Daerah, di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum untuk dilaksanakan. (tw)

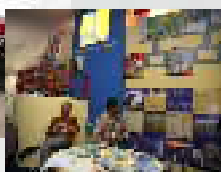
Lampiran 1 : Biaya Langsung Personil (Remuneration)

Pendidikan Tenaga Ahli		S-1	S-2/S-3	KETERANGAN
Kelompok Ahli	Tahun Pengalaman Profesional	Rupiah (Per-Bulan)	Rupiah (Per-Bulan)	
Ahli Muda	1-4	7.500.000 s/d 10.000.000	11.450.000 s/d 14.550.000	(1) Besaran biaya langsung personil tersebut diperoleh dari kontrak-kontrak yang pernah dilaksanakan di lingkungan Dep. Pekerjaan Umum lokasi di Jakarta dengan tanpa membedakan sumber dana, yang dinilai dapat digunakan sebagai acuan dalam penyusunan HPS/RAB pekerjaan jasa konsultansi yang dibiayai dengan dana APBN dan sebagian atau seluruhnya dengan pinjaman/hibah luar negeri. (2) Untuk keperluan penyusunan HPS/RAB pekerjaan jasa konsultansi di daerah-daerah lain agar dilakukan penyesuaian dengan mempertimbangkan tempat (lokasi), keterbatasan fasilitas/sarana prasarana/biaya setempat, yang wajar. Penyesuaian dimaksud dengan menggunakan indikator ekonomi yang dikeluarkan BPS atau memperhitungkan faktor pengali (indeks) seperti pada Lampiran : 2.
Ahli	5-8	10.900.000 s/d 13.700.000	15.550.000 s/d 18.600.000	
Ahli Utama	9-12	14.600.000 s/d 17.350.000	19.650.000 s/d 22.700.000	
Ahli Kepala	13-16	18.300.000 s/d 21.050.000	23.700.000 s/d 26.750.000	
	17-20	21.950.000 s/d 24.700.000	27.800.000 s/d 30.850.000	

Lampiran 2 : Besaran Indeks Wilayah Propinsi di Indonesia

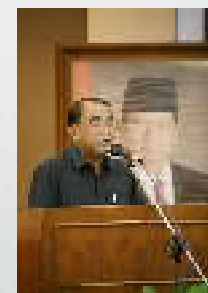
No	Propinsi	Indeks	No	Propinsi	Indeks
1	Nanggroe Aceh Darussalam	1,246	18	Nusa Tenggara Barat	0,982
2	Sumatera Utara	1,071	19	Nusa Tenggara Timur	1,062
3	Sumatera Barat	1,026	20	Kalimantan Barat	0,992
4	Riau	0,928	21	Kalimantan Tengah	0,983
5	Kepulauan Riau	1,053	22	Kalimantan Selatan	1,043
6	Jambi	0,907	23	Kalimantan Timur	1,047
7	Sumatera Selatan	1,088	24	Sulawesi Utara	0,995
8	Kepulauan Bangka Belitung	1,064	25	Sulawesi Tengah	1,073
9	Bengkulu	1,046	26	Sulawesi Tenggara	1,084
10	Lampung	1,046	27	Sulawesi Selatan	0,996
11	Banten	1,025	28	Sulawesi Barat	0,996
12	DKI Jakarta (Benchmarking)	1,000	29	Gorontalo	1,008
13	Jawa Barat	1,054	30	Maluku	0,964
14	Jawa Tengah	1,033	31	Maluku Utara	1,024
15	DI Yogyakarta	1,047	32	Papua	1,097
16	Jawa Timur	0,995	33	Irian Jaya Barat	1,097
17	Bali	0,969			

Galeri Foto



Teknologi Tepat Guna untuk Masyarakat.

BPKSDM turut serta dalam Gelar TTG (Teknologi Tepat Guna) Nasional IX yang diselenggarakan di Manado Convention Center (MCC) tanggal 6 hingga 10 Nopember 2007.



LPJKN diharapkan ciptakan iklim kondusif bagi jasa konstruksi nasional.

"Masukan-masukan yang bermanfaat sangat berguna untuk penyediaan penyedia jasa yang berkualitas dan berdaya saing," kata Budi Yuwono dalam Rapat Anggota untuk Penetapan Pimpinan dan Kaeanggotaan Majelis Pertimbangan LPJKN masa bakti 2007-2011 Selasa (30/10) di Jakarta.

"Tidak boleh ada intervensi apapun dalam pemilihan nanti," tambah Malkan Amin, Ketua Umum LPJKN yang berpesan agar anggota yang hadir memilih Ketua dan Wakil Ketua yang mampu memimpin dan mempersatukan anggota-anggotanya sehingga pelaksanaan tugas majelasi dapat dilaksanakan dengan maksimal.



Booming Konstruksi 2008

"Tender bisa dimulai sejak Nopember tahun ini dan tanpa harus menunggu DIPA selesai," kata Budi Yuwono, Kepala BPKSDM dalam Temu Wartawan, Kamis (08/11) di Jakarta. Sementara itu, Ketua LPJKN Malkan Amin yang turut hadir dalam acara tersebut mengatakan untuk mendukung langkah yang diambil Menteri PU beserta jajarannya, LPJKN akan mempercepat sertifikasi badan usaha (SBU). Hal ini juga terkait dengan masa berlaku SBU tahun 2006 yang diperpanjang hanya sampai dengan 31 Oktober 2007, dan untuk selanjutnya digunakan hanya SBU tahun 2007. "LPJKN berjanji akan mengerahkan segenap kemampuan untuk merealisasikan hal ini," ungkap Malkan Amin. Jadi diharapkan tidak akan ada lagi alasan bagi penyedia jasa terlambat mengikuti tender karena belum dapat SBU.



Jasa Konstruksi Nasional Perlu Segera Lakukan Standarisasi

"Untuk negara berkembang seperti Indonesia tidak ada pilihan lain jika ingin terlibat dalam liberalisasi perdagangan yang ditawarkan negara lain, meski disisi lain kita belum sepenuhnya siap menghadapi persaingan dengan negara maju," jelas Budi Yuwono, Kepala BPKSDM saat membuka Roadshow Technical Barriers To Trade-WTO kerjasama Dep PU dengan Badan Standarisasi Nasional (BSN) Kamis (01/11) di Jakarta. Liberalisasi perdagangan dimana Indonesia terlibat baik dalam forum dunia (WTO) maupun regional (ASEAN) pada hakekatnya merupakan perdagangan bebas yang tetap memiliki aturan, melalui proses negosiasi bertahap. Pengaturan tersebut berupa daftar hambatan (Schedule of Commitments) yang harus dinyatakan secara transparan ydan bersifat progresif. Daftar hambatan tersebut harus dinyatakan secara eksplisit dan spesifik agar negara anggota lainnya dapat memaklumi, serta bertahap harus diperlonggar pada periode perundingan berikutnya. Persyaratan tersebut sudah menjadi konsekuensi dari negara berkembang seperti Indonesia sebagai anggota WTO.



Tindakan Nyata dalam berkarya.

"Dalam penilaian, terdapat tim 9 sebagai juri pelaksanaan lomba," ujar Eko Budihardjo, Ketua Dewan Juri Lomba Konstruksi 2007 dalam wawancara di TVRI, Jakarta (26/10). Konstruksi Indonesia sendiri telah diadakan tiap tahun sejak 2003. Eko mengharapkan munculnya untulan dalam Konstruksi Indonesia 2007 akan semakin memacu motivasi dalam berkarya dengan motif yang berbeda akibat keragaman yang ada di tanah air.



PR untuk sambut 2008

Salah satu rangkaian kegiatan Konstruksi Indonesia 2007 adalah Seminar dengan tema Peluang & Tantangan Pembangunan Infrastruktur 2008 diselenggarakan BPKSDM, Kamis (15/11) di Jakarta untuk mengantisipasi Booming Konstruksi 2008. Masing-masing pihak dari unsur Pemerintah dan Swasta mitra kerja konstruksi mempunyai pekerjaan rumah dengan sisa waktu yang 2 bulan ini untuk menyiapkan SDM, peralatan dan material, termasuk peraturan yang mendukungnya untuk menyelesaikan pembangunan infrastruktur 2008.



Pemerintah-mitra kerja bersama hadapi peluang & tantangan konstruksi Indonesia 2008.

"Masyarakat jasa konstruksi nasional diharapkan dapat memanfaatkan kesempatan tersebut untuk meningkatkan kompetensi dan daya saing masing-masing sebelum liberalisasi perdagangan jasa dilaksanakan secara penuh," kata Budi Yuwono, Kepala BPKSDM di sela-sela acara Halal Bih Halal Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (GAPENSI) Rabu (24/10) di Jakarta.



Saatnya tenaga konstruksi terampil Indonesia diakui internasional.

"Lomba tukang dan mandor juga dimaksudkan untuk menunjukkan pada masyarakat luas bahwa tenaga konstruksi Indonesia mampu menghasilkan produk bidang infrastruktur yang berkualitas," ungkap Krisna Nur Mradi, Pelaksana Harian Kepala Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi (PusbinkPK) BPKSDM Dep PU saat membuka Lomba Tukang dan Mandor dalam rangka Konstruksi Indonesia 2007 Serin (19/11) di Jakarta

Kenaikan anggaran yang dikelola oleh Departemen Pekerjaan Umum di tahun 2008 akan meningkat secara luar biasa. Kenaikan anggaran sebesar 49 % dibanding anggaran tahun 2007, atau mempunyai nilai nominal sebesar Rp. 35,6 triliun. Kalau biasanya kita menangani proyek banjir maka tahun 2008 kita juga banjir proyek.

'Berkah proyek' yang melimpah ini tentulah membawa konsekuensi dan tanggung jawab yang sangat berat mengingat keberadaan sumber daya yang tersedia masih itu-itu juga. Sumber daya yang sangat penting tentulah manusia dan waktu. SDM Departemen Pekerjaan Umum harus benar-benar disiapkan dengan sebaik-baiknya mengingat 'gawe' besar tersebut, paling tidak kemampuan dan waktu ataupun kinerjanya harus meningkat dari tahun 2007.

Tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan di tahun 2008 bukan merupakan hal yang mudah dan ringan mengingat dari pelaksanaan pada saat ini saja banyak terjadi lubang-lubang (untuk Bina Marga mohon diartikan secara harfiah) yang masih perlu diperbaiki. Jadi sambil memperbaiki juga meningkatkan, apalagi kalau bukan kinerjanya. Artinya perlu tambah satu 'proyek' lagi yaitu 'proyek peningkatan kinerja'!

SDM yang ada di lingkungan Departemen PU, lebih mudah ditangani karena kewenangan sepenuhnya dapat dipegang oleh pimpinan departemen. Tinggal

kebijakan dan strateginya saja yang harus disusun dengan sebaik-baiknya, apalagi mungkin tidak lagi terkendala dengan masalah uang. Tetapi yang justru lebih sulit adalah menyiapkan SDM mitra kerja, rekanan ataupun penyedia jasa yang nota bene adalah di luar jangkauan otoritas departemen. Sementara secara nyata mereka-mereka yang sebenarnya yang akan mengerjakan dan melaksanakan proyek di lapangan.

Dengan meningkatnya volume pekerjaan, naik pula permintaan terhadap keberadaan penyedia jasa pemborong/konsultan. Sementara di sisi yang lain ketersediaan penyedia jasa masih tetap. Keseimbangan yang akan terjadi adalah berupa penurunan kualifikasi atau kualitas dari penyedia jasa untuk memenuhinya. Disini akan berlaku hukum *tidak ada rotan akarpun jadi*.

Untuk mendapatkan penyedia yang relatif baik, secara teoritis mungkin dapat di upayakan dengan berbagai macam aturan atau kriteria yang canggih (tentu saja sejauh

masih dalam batas Keppres 80/2003). Kenyataannya, hukum 'rotan' akan lebih menang dan terjadi!

Untuk menghadapi kenyataan ini, langkah apa yang harus segera diambil? Karena tanggung jawab kembali ke departemen, bukan ke penyedia jasa maka tidak ada jalan lain kecuali SDM departemen yang harus terlebih dulu di tingkatkan sedemikian rupa untuk mengisi kekurangan atau kelemahan 'akar' agar dapat menyelesaikan gawe besar 2008.

Persiapan melalui ritual berupa *gemblengan* untuk kandidat yang dipilih dari tenaga-tenaga PNS baru, dapat dilakukan mulai saat ini, senyampang masih ada waktu, *mumpung padhang rembulané jembar kalangané*.

Mudah-mudahan masih bisa ditemukan tenaga-tenaga muda yang mempunyai kualifikasi *otot kawat balung wesi* (dan gaji kecil) untuk dipersiapkan menjadi calon pemimpin masa depan Departemen Pekerjaan Umum atau apapun nantinya nama dari departemen ini -yang jelas tupoksinya adalah menyiapkan sarana dan prasarana umum-.

Bagi yang terpilih, disiapkan pelatihan teknik secara intensif dan langsung diterjukkan untuk mengisi kekurangan para 'akar' tadi. Syukur-syukur peristiwa 'banjir' diatas juga dapat menjadikan momentum untuk mendapatkan dan mencari bibit-bibit dan pewaris semangat '*sapta taruna*' masa depan.

Apapun upaya yang dilakukan, yang akan menjadi keharusan dan keniscayaan adalah kita harus bekerja ekstra keras dan cerdas menghadapi tantangan pekerjaan 2008.

Penulis : Widya Iswara Madya Departemen PU.



Paket Kegiatan Pekerjaan Konstruksi di Lapangan

Oleh: Bambang Sukaryatno *)

Kemampuan teknis tenaga kerja nasional terkait dengan industri konstruksi secara umum tidaklah buruk amat khususnya tenaga ahli memiliki pendidikan dan pengalaman yang cukup. Demikian juga dengan tenaga terampil memiliki semangat kerja dan sebagian besar masih sanggup bekerja di medan yang berat, terus berusaha memperbaiki manajemen dan daya saing / kompetisi. Semangat pengabdian mereka juga tidak rendah, masih memiliki orientasi bekerja untuk kesejahteraan yang berpengaruh pada kepentingan bangsa. Hasrat bekerja sama diantara mereka tidak terlalu buruk, sebagian organisasi profesi masih aktif.

Pembangunan infrastruktur khususnya sektor konstruksi kedepan semakin meningkat dan ini merupakan

sarana bagi tenaga kerja konstruksi mendapatkan kesempatan memperoleh lapangan pekerjaan melalui badan usaha maupun perorangan. Hal ini dapat dijadikan objek pembinaan dengan menetapkan target orang yang akan dibina secara berkesinambungan baik oleh Pemerintah maupun perangkat daerah sebagai subjek dalam pelaksanaannya. Infrastruktur SDM dan Institusi maupun organisasi profesi di bidang jasa konstruksi sudah semakin banyak dan mulai tertata dengan baik, menjadikan wadah bagi tenaga kerja

konstruksi untuk dapat di bina secara sistemik .

Seiring dengan pengaturan tentang mekanisme sinergitas kelembagaan tersebut yang sudah mulai dibangun, merupakan sarana yang dapat dimanfaatkan oleh Tim Pembina Jasa Konstruksi dari tingkat pusat sampai daerah untuk melakukan tugas pembinaan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 35



Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi dan secara lebih rinci di uraikan dalam PP 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi.

Letak masalah bukan semata-mata pada kemampuan dan watak para tenaga kerja kita, tapi pada struktur sosial yang membelenggu, banyak saluran tersumbat. Industri konstruksi terbingkai dalam struktur hirarkis, ada pihak-pihak (kuat) secara sistematis menyumbat kegiatan. Terjadi eksploitasi, kesenjangan,

defisiensi, perlakuan diskriminatif, sarat kepentingan dan sebagainya.

Perlu adanya nilai-nilai luhur yang tercermin dalam Visi dan misi yang dapat menjabarkan tujuan apa yang hendak dicapai untuk 5 tahun kedepan misalnya, dan memiliki sasaran yang relevan, terukur, lebih singkat (misalnya 1 tahun). Untuk itu diperlukan kebijakan yang riil dengan menelorkan pelbagai ketentuan sebagai

pedoman kegiatan. Dengan demikian dapat dirumuskan program kegiatan yang sistematis dan terpadu.

Tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dapat dijadikan modal sosial yang handal bagi SDM Konstruksi untuk mampu berkompetisi (daya saing) dengan

membangun sistem melalui *networking* (kerjasama pengembangan teknologi dan pangsa pasar), *trust* (daya saing dan kepuasan konsumen), dan *reciprocity* (saling diuntungkan : pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat).

Tenaga kerja konstruksi terbagi atas Tenaga Ahli (TA) dan Tenaga Terampil (TT) merupakan tumpuan utama dan asset Negara dalam sistem usaha dibidang jasa konstruksi. Untuk itu perlu adanya bentuk/ pola pembinaan SDM Konstruksi yang dikembangkan dalam upaya peningkatan kemampuannya. Disisi lain Undang-Undang

No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi mengamanatkan bahwa setiap Tenaga Ahli maupun Tenaga Terampil yang bekerja disektor konstruksi harus memiliki sertifikat Keahlian (SKA) bagi Tenaga Ahli maupun Sertifikat Keterampilan (SKTK) bagi Tenaga Terampil Konstruksi.

Dalam kaitannya dengan pembinaan SDM konstruksi dimaksudkan adalah khususnya diperuntukan bagi Tenaga Terampil Konstruksi yang akan dijadikan pilot project pembinaan. Sebagai salah satu bentuk/ pola pembinaan tersebut di atas akan dicoba untuk dikembangkan adalah pola pemberdayaan pada paket-paket kegiatan konstruksi (proyek fisik) yang ada di daerah yang mekanismenya ditentukan terlebih dahulu Tenaga Kerja Konstruksi Terampil oleh instansi terkait melalui Tim Pembina Jasa Konstruksi di Daerah berdasarkan Panduan atau rahan dari Pembina Jasa Konstruksi Pusat untuk ditetapkan sebagai target pembinaan secara berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kemampuan/ kompetensi menuju profesionalisme tenaga kerja konstruksi sebagaimana dimaksud dapat ditetapkan, untuk tahap awal minimal 1 orang yang dititipkan pada setiap paket Pekerjaan Konstruksi di setiap provinsi, dengan asumsi 100 paket per provinsi, sehingga pencapaian target tenaga kerja konstruksi yang menjadi object pembinaan berkesinambungan secara nasional mencapai 3300 orang per tahun.

Dalam kemasan program ini peran Pemerintah hanya sebagai stimulator saja dan untuk selanjutnya dapat diteruskan oleh perangkat daerah maupun mitra kerja yang tergabung dalam Lembaga (LPJK), Organisasi Profesi (Asosiasi Jasa Konstruksi) serta Badan Usaha itu sendiri

berkoordinasi dengan Tim Pembina Jasa Konstruksi Provinsi.

Disisi lain pengaturan tentang usaha orang perseorangan sebagaimana diamanatkan Undang-undang Jasa Konstruksi dan telah terbuka pula ketentuan tentang hal ini yang diatur dan dikembangkan oleh LPJK akan lebih merangsang serta memberi kesempatan tenaga kerja yang bersangkutan berusaha secara independent dan professional.

Penataan SDM konstruksi khususnya tenaga terampil sebagai ujung tombak dan insan pembangunan menjadi sangat prioritas dalam upaya mewujudkan hasil pekerjaan konstruksi yang berkualitas, mengingat operasionalisasi proses pekerjaannya mengandalkan kemampuan dan kompetensi tinggi dan professional tenaga kerja dimaksud. Oleh karenanya melalui pembinaan SDM yang dikemas dalam pola pemberdayaan di paket-paket kegiatan Pekerjaan Konstruksi di lapangan yang ada di daerah-daerah diseluruh kawasan Indonesia ini akan menjadi lebih efektif dan berdayaguna apabila dapat direalisasikan dan dilakukan pembinaannya secara berkesinambungan. Untuk itu diperlukan semangat dan kemauan yang tinggi pula dari aparat Pemerintah dalam hal ini instansi yang menangani pembinaan SDM konstruksi khususnya, disamping perangkat dan sarana pendukung lainnya yang cukup tersedia dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin dengan mekanisme pelaksanaannya yang koordinatif dan sinergi antar instansi serta Unit Kerja di Daerah yang menangani paket kegiatan pekerjaan konstruksi. Untuk mewujudkan hal ini tentu diperlukan sarana dan perangkat yang dapat mendukung kegiatan secara sistematis dari tataran Pusat dan Daerah dengan kebijakan yang dapat dioperasionalkan dilapangan.

Apabila rencana sebagaimana diuraikan tersebut diatas dapat direalisasikan, kiranya dapat diperoleh manfaat terutama bagi tenaga kerja konstruksi itu sendiri dan menjadi perhatian baik oleh

Pemerintah maupun Badan usaha sebagai pihak pemakai akan berpengaruh kepada kinerja badan usaha jasa konstruksi, bagi pemerintah dapat memperoleh penyedia jasa dari sisi tenaga kerja yang professional dan berdaya saing tinggi yang nantinya dapat dijadikan aset Pemerintah khususnya di daerah, serta terakumulasinya data tenaga kerja konstruksi terampil secara berjenjang dan tersebar diseluruh Indonesia. Bila memungkinkan dapat pula di jadikan asset negara untuk lebih meningkatkan pembangunan nasional yang berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja yang selalu tersedia bagi mereka, bahkan dapat pula dilakukan program ekspor tenaga kerja konstruksi ke manca negara dengan bekal pengalaman dan keterampilan yang berstandar internasional.

Demikian harapan yang hendak diwujudkan sesuai dengan visi dan misi Undang-undang Jasa Konstruksi antara lain mewujudkan struktur usaha dibidang jasa konstruksi yang kokoh dan handal serta berdaya saing tinggi, tertib dalam penyelenggaraannya.

Program peningkatan SDM konstruksi khususnya tenaga kerja terampil perlu ditata dengan baik dan di data serta dibina secara lebih baik dan berkesinambungan oleh pihak-pihak terkait. Pemerintah sebagai pembina lebih berperan pada upaya pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan serta terbukanya lapangan kerja yang lebih luas di sektor konstruksi melalui program pemberdayaan tenaga terampil pada paket-paket pekerjaan konstruksi instansi pemerintah baik dengan dana APBN maupun APBD di daerah sebagai *training ground* dalam pengembangan pola pembinaan untuk mengimplementasikan amanat Undang-Undang Jasa Konstruksi berikut peraturan pelaksanaannya.

Pasar konstruksi di pemerintah diperkirakan hanya 40 % cukup dapat dijadikan modal pembinaan SDM dimaksud secara berkesinambungan dan untuk selanjutnya mereka dapat memasuki pasar konstruksi di swasta yang mencapai 60 % agar dapat lebih kompetitif dan percaya diri dalam mengembangkan dan meningkatkan kemampuannya sebelum berorientasi ke pasar regional (ASEAN) maupun internasional (WTO/ GLOBAL).

Penulis : Kepala Sub Bidang Kelembagaan Usaha, Pusat Pembinaan Usaha Konstruksi.



BPKSDM TURUT HJAUKAN DUNA



Kepala BPKSDM, Budi Yuwono mengawali penanaman pohon

Banjir yang melanda Muara Baru Jakarta beberapa bulan belakangan ini seperti menggugah pemikiran kita. Bukan pada air bah yang membanjir melebihi alurnya yang sudah seperti tradisi di ibukota Indonesia ini, namun penyebabnya yang ternyata akibat naiknya air pasang laut jauh melebihi tanggul hingga masuk ke pemukiman, bahkan telah berlangsung berbulan-bulan. Patut dicatat, keadaan ini belum pernah terjadi sebelumnya. Hingga menimbulkan pertanyaan, ada apa gerakan dengan alam?

Mungkin ini hanyalah sebuah pertanda, dan bukti dari fenomena perubahan iklim (*climate change*) akibat ulah tangan manusia hingga menyebabkan

pemanasan global (*global warming*). Pergantian musim yang tidak bisa diprediksikan waktunya, iklim yang kontras di satu wilayah dengan wilayah lain, banjir yang terjadi semakin meningkat baik jumlah maupun luas wilayah yang terkena, badai dan angin topan yang semakin kuat, hanyalah sebagian kecil kondisi bumi yang semakin parah, terutama di Indonesia.

Melalui Konferensi UN Climate Change yang diselenggarakan di Bali awal Desember 2007 lalu, menjadi sebuah hentakan kesadaran bagi semua pihak untuk melakukan langkah-langkah nyata mencegah efek pemanasan global semakin meluas. BPKSDM Dep. PU, bagian dari pembangunan masyarakat Konstruksi Indonesia, merasa turut andil dalam usaha mengurangi efek pemanasan global. Untuk

itulah dilaksanakan Gerakan Penanaman 5000 pohon di seluruh Satminkal BPKSDM yang tersebar di Seluruh Wilayah Indonesia.

Gerakan ini diawali di Kampus Balai Pelatihan Konstruksi Suratmo Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi (Pusbin KPK) di Jakarta, dimana Kepala BPKSDM Budi Yuwono secara simbolik mengawali penanaman pohon, bersama Ibu Budi Yuwono, Sekretaris BPKSDM Dadan Krisnandar, PLH Kepala Pusbin KPK BPKSDM Krisna Nur Miradi, Kepala Pusbikteck BPKSDM Nana Rukmana, dan Kepala Pusat PPK BPKSDM Sukistiarso, Selasa 04 Desember 2007. Untuk selanjutnya akan ditanam sebanyak 300 pohon di Kampus Balai Pelatihan Konstruksi Jakarta ini.

Berbeda dengan gerakan penanaman pohon yang lain, BPKSDM khusus menanam pohon Jati Jumbo. Alasannya, menurut Budi Yuwono, pohon Jati jenis ini sesuai yang dibutuhkan industri konstruksi saat ini yang berarti sesuai Tupoksi Pembinaan Konstruksi dan bernilai ekonomis, selain juga karena cepat tumbuh dan tahan terhadap angin, cuaca panas sekaligus menjadi hutan kota di tengah-tengah polusi. Dalam 8 tahun lagi pohon Jati Jumbo ini bisa dipanen, untuk kemudian dimanfaatkan sesuai tupoksi terutama sebagai bahan baku pelatihan keterampilan tukang

Selain secara simbolik mencanangkan gerakan tanam sejuta pohon di lingkungan BPKSDM, Budi Yuwono juga meninjau Balai Peralatan Konstruksi, yang



Bu Budi Yuwono melakukan penanaman pohon

menyediakan secara lengkap peralatan pelatihan tenaga terampil Konstruksi, seperti Bengkel Pembesian, Bengkel Kayu, Tower Crane, dan lain sebagainya. Dalam kesempatan itu pula Kepala BPKSDM berkesempatan tanya-jawab dengan peserta pelatihan tenaga terampil tukang konstruksi. Dalam dialog singkat tersebut Budi Yuwono berpesan agar peserta bersungguh-sungguh mengikuti pelatihan, memperbanyak pengalaman untuk kemudian terjun ke dunia kerja sesungguhnya.

Program Gerakan penanaman 5000 pohon ini juga turut mendukung gerakan perempuan tanam dan pelihara 10 juta pohon yang baru-baru ini dicanangkan oleh Ibu Ani Yudhoyono, serta diilhami UN Climate Change Conference 2007 yang baru saja dilaksanakan di Bali. Sebagai tindak lanjut BPKSDM akan menerapkan "Proses Pembelajaran Ramah Lingkungan Industri Konstruksi" untuk Balai-Balai Konstruksi di seluruh Indonesia. Dalam waktu dekat akan dibuat Surat Edaran untuk melegalkan penanaman pohon di seluruh Balai BPKSDM. Gerakan ini menjadi wujud kepedulian BPKSDM Dep.PU terhadap keberlangsungan lingkungan hidup yang lebih baik di masa mendatang.

Gerakan penanaman 5000 pohon yang kedua dilaksanakan di Kampus Pusat Pembinaan Keahlian dan Teknik Konstruksi (Pusbikte) Bandung Jumat 28 Desember 2007. Di kampus ini ditanam 500 pohon, terutama pohon peneduh. Diharapkan penanaman ini akan mengurangi emisi gas hasil pembakaran kendaraan bermotor. Setiap usaha

dilakukan menjadi kontribusi positif untuk dapat mencegah akibat pemanasan global yang akhir-akhir ini sudah sangat terasa merugikan manusia, salah satunya dengan gerakan menanam pohon.

Menghentikan efek pemanasan global bukan tidak mungkin, meskipun sulit harus dilakukan dari hal yang paling sederhana dan di lingkungan sendiri. Untuk itu Kepala B P K S D M menghimbau kepada tiap Satminkal yang ada di lingkungan BPKSDM mulai menghidupkan lingkungan masing-masing, dimulai saat ini juga, dan yang paling penting dilaksanakan secara rutin. Kesadaran gerakan penghijauan untuk mengurangi *global warming* jangan hanya karena Konferensi UN Climate Change di Bali beberapa waktu yang lalu namun lebih karena kesadaran sendiri sebagaimana diharapkan Kepala BPKSDM.

Selain itu Budi Yuwono juga mengingatkan kepada segenap keluarga besar



Sekretaris BPKSDM, Dadan Krisnandar melakukan penanaman pohon

BPKSDM mengenai tugas pembinaan SDM Konstruksi yang tidaklah ringan. BPKSDM tidaklah hanya harus membina dan mencetak tenaga konstruksi di lingkungan Dep. PU (PNS) namun lebih luas lagi, harus juga mampu membina dan mencetak keseluruhan masyarakat jasa konstruksi. Ditambah lagi Pembangunan Infrastruktur 2008 mendatang, serta globalisasi menuntut ketersediaan SDM Konstruksi yang tidak hanya meningkat secara kualitas namun juga harus memiliki daya saing tinggi. Tugas ini hanya mampu dikerjakan melalui kerjasama seluruh aspek BPKSDM.

Seusai penanaman pohon, acara dilanjutkan dengan Evaluasi Kegiatan Pusbikte Tahun 2007 yang membahas seputar permasalahan dan kendala yang dihadapi Pusbikte. Permasalahan dan kendala tersebut antara lain seputar tenaga SDM (CPNS) yang masih kurang, pengelolaan aset yang masih perlu ditingkatkan, dan lain sebagainya. Diharapkan melalui pengenalan permasalahan akan didapatkan solusi untuk menghadapi pembangunan infrastruktur 2008 yang semakin menantang. (tw)



Hari Bhakti Pekerjaan Umum bermula dari peristiwa heroik 3 Desember 1945 yang ditunjukkan oleh para pemuda pegawai “Departemen Perhoebongan dan Pekerdjaan Oemoem” dalam mempertahankan Gedung Sate yang pada waktu itu dipergunakan sebagai kantor Pusat Departemen Pemerintahan Republik Indonesia. Peristiwa kepahlawanan ini telah mempersembahkan tujuh martir (Sapta Taruna) ke haribaan Ibu Pertiwi dan terus dikenang dan diperingati sebagai Hari Bhakti Pekerjaan Umum.

Semangat dan etos kerja yang tinggi yang tercermin dalam motto “Bekerja Keras-Bergerak Cepat -Bertindak Tepat” harus menjadi budaya seluruh jajaran Departemen Pekerjaan Umum dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dalam rangka mendukung terwujudnya Indonesia yang aman dan damai, adil dan demokratis serta lebih sejahtera.

Presiden Republik Indonesia, dalam acara pembukaan Indonesia Infrastructure Conference and Exhibition 2006 yang lalu, menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur merupakan kunci sukses pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kegiatan tersebut akan menjadi stimulan bagi pembukaan lowongan kerja yang besar. Untuk itu, Pemerintah menawarkan 10 model proyek senilai US\$ 4,4 Miliar dan mempersiapkan 101 proyek potensial lain senilai US\$ 14,7 Miliar. Secara garis besar, proyek tersebut meliputi pembangunan jalan tol, sarana penyediaan air bersih, pembangkit listrik, perpipaan gas, prasarana transportasi dan prasarana telekomunikasi. Di samping itu, Pemerintah tetap melanjutkan pembangunan Infrastruktur lain melalui dana APBN di Departemen teknis serta dana APBD Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Jasa konstruksi merupakan tulang punggung bagi pembangunan infrastruktur. Dalam hal ini, jasa konstruksi mampu memberikan kontribusi sekitar 6% dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB) dan menyerap tenaga kerja sekitar 5% dari angkatan kerja tahun 2005, belum termasuk angkatan kerja yang bekerja di lingkungan industri yang mendukung sektor konstruksi; seperti industri semen, baja, pipa, perkayuan dan aspal.

Hari Bhakti PU dan Relevansinya dengan Pembinaan Jasa Konstruksi

Oleh : Doedoeng Z. Arifin *)

Karena perannya yang strategis tersebut, maka perlu dilakukan pembinaan jasa konstruksi secara serius, baik kepada para pengguna jasa, penyedia jasa maupun masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk menumbuhkan pemahaman dan kesadaran akan tugas dan fungsi serta hak dan kewajiban masing-masing serta untuk meningkatkan kemampuan para pihak dalam mewujudkan tertib usaha jasa konstruksi, tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi dan tertib pemanfaatan hasil pekerjaan konstruksi

Pembinaan jasa konstruksi nasional merupakan tugas yang sangat berat yang tidak mungkin dapat diselesaikan sendiri oleh Departemen Pekerjaan Umum sebagai Departemen Teknis yang bertanggung jawab dalam bidang konstruksi. Seluruh *stakeholders* diharapkan mendukung dan bekerjasama dalam upaya pengembangan jasa konstruksi nasional. Untuk itu diperlukan semacam *blue print* (cetak biru) pembinaan jasa konstruksi agar setiap *stakeholder* dapat memahami dan melaksanakan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dengan sebaik-baiknya.

Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh badan usaha nasional dalam meraih pasar jasa konstruksi internasional, perlu disusun berbagai paket kebijakan deregulasi di sektor perpajakan (biaya fiskal), permodalan dan perbankan. Hal ini sangat diperlukan agar badan usaha jasa konstruksi nasional dapat lebih kompetitif.

Indonesia telah meratifikasi pendirian Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), yaitu melalui Undang-undang No. 7 tahun 1994. Oleh sebab itu, semua kesepakatan yang dicapai dalam WTO mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Pada dasarnya, kesepakatan-kesepakatan tersebut berupa pembatasan-pembatasan yang dinyatakan secara transparan dan secara progresif harus dikurangi hingga akan dicapai liberalisasi penuh pada tahun

2020. Dengan demikian, para pemangku kepentingan harus memanfaatkan pembatasan dan waktu yang ada untuk mempersiapkan diri guna meningkatkan daya saing jasa konstruksi nasional menghadapi persaingan global pada tahun tersebut.

Di tingkat regional, Indonesia pun senantiasa aktif mengambil bagian dalam setiap perundingan liberalisasi perdagangan dengan negara-negara anggota ASEAN yang lain. Bahkan di lingkungan ASEAN pelaksanaan liberalisasi penuh dipercepat menjadi tahun 2015. Hal ini dimaksudkan agar negara-negara anggota ASEAN berkesempatan melatih diri dalam lingkungan terbatas sebelum menghadapi persaingan global dengan para anggota WTO yang lain.

Di lingkungan ASEAN telah disepakati pula pemberlakuan *Mutual Recognition Arrangement* (MRA) Sub-Sektor Jasa Engineering yang diantaranya mencakup jasa Rekayasa Konstruksi. Lima negara anggota ASEAN, yaitu Indonesia, Malaysia, Philipina, Singapura dan Thailand, sepakat untuk melaksanakan MRA mulai pertengahan Tahun 2007. Sementara lima negara ASEAN lainnya harus melaksanakannya paling lambat Tahun 2008. *Monitoring Committee* (MC) yang telah dibentuk sebagai salah satu unsur organisasi MRA di Indonesia akan mempersiapkan segala infrastruktur yang diperlukan dalam pelaksanaan MRA.

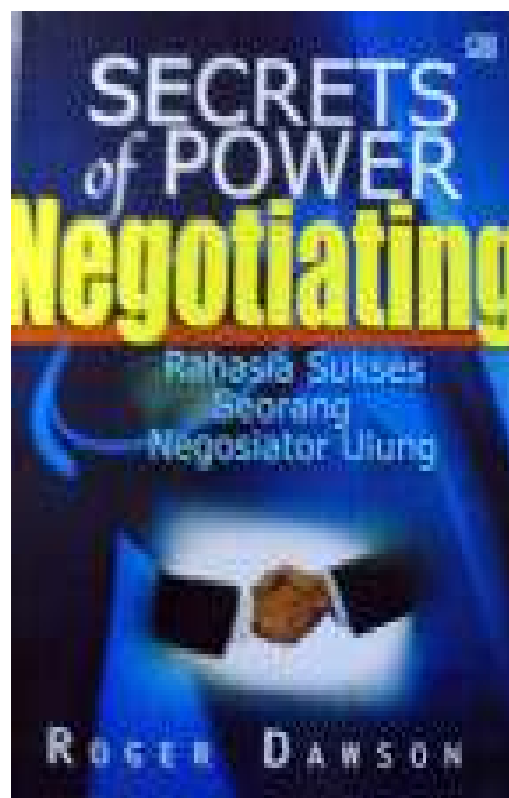
Untuk dapat memenangkan persaingan global, di samping harus memenuhi persyaratan teknis sebagaimana diuraikan sebelumnya, badan usaha jasa konstruksi nasional juga harus mengembangkan diri menjadi badan usaha yang produktif, terintegrasi dan efisien. Salah satu upaya yang dapat ditempuh adalah dengan menerapkan *Good Corporate Governance*.

Penulis : Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Sekretariat BPKSDM.

Secrets of Power Negotiating

Roger Dawson

Negosiasi memainkan peran sangat penting dalam kehidupan keseharian kita, baik di kehidupan berkeluarga, bekerja di perusahaan, melakukan transaksi, atau membina hubungan. Buku ini dikembangkan berdasarkan program audio cassette, yang akan memberi petunjuk bagaimana cara memenangkan negosiasi dan membuat pihak lawan (dalam negosiasi) merasa bahwa ia juga memenangkan aspek tertentu dalam negosiasi. Dilengkapi juga dengan nasihat praktis, dan langkah strategis mulai dari langkah awal sampai dengan manuver-manuver akhir yang sangat penting, mengenai taktik negosiasi yang tidak etis, prinsip-prinsip utama dalam negosiasi, memahami pihak lawan dan berada di atas angin, serta analisis-analisis gaya negosiasi yang berlainan. Setelah membaca dan mencermati buku ini, anda akan memperoleh seni keterampilan untuk menggunakan puluhan gambit (taktik) negosiasi, menerapkan prinsip-prinsip negosiasi, memecahkan negosiasi yang alat, bernegosiasi dengan orang Amerika, Eropa dan Asia, serta menguasai jalannya negosiasi terhadap pihak lawan. (R.Sulistyowati)



Hubungi Kami

Bulletin BPKSDM mengupas tentang Konstruksi Indonesia. Untuk berlangganan atau hendak menjadi kontributor, dapat menghubungi :

Tim Redaksi Bulletin BPKSDM

Departemen PU

Jl. Pattimura No. 20, Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12110

Telp : (021)7266639

Email : datinfo25@yahoo.com

http : [//bpksdm.pu.go.id](http://bpksdm.pu.go.id)

Segenap Pimpinan dan Karyawan
Badan Pembinaan Konstruksi dan Sumber Daya Manusia
Mengucapkan

**Selamat Natal dan
Tahun Baru 2008**

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.